

**MAKALAH SEJARAH HUBUNGAN AMERIKA  
SERIKAT-INDONESIA**

**“AMERIKA SERIKAT DAN PEMBERONTAKAN PRRI/PERMESTA”**



Erika (0706291243)  
Muti Dewitari (0706165570)  
Rindo Sai'o (0706195583)  
Winda (0706291464)  
Yandri Mardani Sumardi (0706299731)

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2009**

## **Deskripsi PRRI/Permesta**

Suasana demokrasi liberal di tahun 1950-an telah menimbulkan kekacauan dan pergolakan-pergolakan dengan kekerasan. Pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1955 tidak berhasil menghilangkan ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Daerah-daerah di luar Jawa merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga di beberapa daerah muncul gerakan-gerakan menuntut otonomi luas. Di bidang ekonomi dan perdagangan hasil ekspor yang sebagian berasal dari daerah-daerah luar Jawa, pembagian penggunaan di Pulau Jawa dianggap tidak adil. Di samping kekecewaan-kekecewaan tersebut, ada suatu masalah yang cukup serius yang mendorong Letnan Kolonel Ahmad Husein di Sumatera Barat bertekad menentang pemerintah Pusat, yaitu adanya penilaian bahwa Bung Karno dianggap mulai dipengaruhi Partai Komunis Indonesia.

Pada akhir bulan Desember 1956 dan permulaan tahun 1957 terjadi pergolakan menentang pemerintah Pusat, di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi. Pergolakan ini dimulai dengan pembentukan “Dewan Banteng” di Sumatera Barat tanggal 20 Desember 1956 dipimpin Letnan Kolonel Achmad Hussein. Tindakan pertama dilakukan dengan mengambil alih pimpinan pemerintah Sumatera Barat dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dua hari kemudian, tanggal 22 Desember 1956 di Medan (Sumatera Utara) terbentuk “Dewan Gajah”, dipimpin Kolonel Maludin Simbolon, yang menyatakan bahwa Sumatera Utara melepaskan diri untuk sementara dari hubungan dengan pemerintah Pusat. Bulan Januari 1957 “Dewan Garuda” mengambil alih pemerintahan dari Gubernur Winarno. Pada tanggal 2 Maret 1957 di Manado diumumkan “Piagam Perjuangan Semester (PERMESTA)” oleh Letnan Kolonel Sumual, menentang pemerintah Pusat.<sup>1</sup>

Tahun 1958 didirikan organisasi yang bernama Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang diketuai oleh Letnan Kolonel Achamad Husein. Gerakan Husein ini akhirnya mendirikan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang berkedudukan di Bukittinggi dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai pejabat presiden.

---

<sup>1</sup> Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa: Periode 1950-1960*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2005), hal. 372.

Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) pada hari berikutnya mendukung dan bergabung dengan PRRI sehingga gerakan bersama itu disebut PRRI/Permesta. Permesta yang berpusat di Manado tokohnya adalah Letnan Kolonel Vantje Sumual, Mayor Gerungan, Mayor Runturambi, Letnan Kolonel D.J. Samba, dan Letnan Kolonel Saleh Lahade.

Lima puluh tahun yang lalu, tepatnya 20 Desember 1957, di sebuah kota kecil di pesisir barat pantai Sumatera yang bernama Salido, berlangsung suatu sidang reuni para militer pejuang yang tergabung dalam Resimen IV Divisi Banteng Sumatera Tengah.<sup>2</sup> Reuni tersebut menghasilkan dan membentuk suatu badan organisasi yang dinamai "Dewan Banteng" dengan tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel M. Simbolon dan lain-lain sebagai para atasan dan penggerakannya. Namun, pada 15 Februari 1958, atas prakarsa "Dewan Banteng", organisasi yang dilahirkan dari hasil reuni militer yang dikepalai oleh Letkol Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek dan Kolonel Maludin Simbolon, "diproklamirkan" sebuah pemerintahan baru yang bernama "Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia" yang disingkat dengan sebutan PRRI, dengan kota Padang sebagai "ibukota negara" dan Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai "Presiden PRRI". Proklamasi PRRI ini, menjadi titik awal perlawanan secara terbuka terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ranah Minang dikuasai oleh oknum-oknum, baik militer maupun sipil, yang tidak merasa puas dengan kepemimpinan Bung Karno, dan membawa rakyat Minangkabau untuk memberontak melepaskan diri dari ikatan persatuan NKRI. Sementara itu, dalam waktu yang sama, di bagian Timur tanah air, juga timbul satu pemberontakan yang senada, perlawanan terhadap NKRI di bawah pimpinan Letkol Ventje Sumual, dengan membentuk pemerintah tandingan yang bernama PERMESTA (Pemerintah Rakyat Semesta).

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin gerakan-gerakan tersebut sama, tidak lain adalah pemerintah Pusat dianggap kurang memperhatikan keadaan daerah disertai tuntutan menambah anggota kabinet dengan Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Menghadapi tantangan dari daerah-daerah, pemerintah Pusat memprakarsai Musyawarah Nasional di Jakarta yang berlangsung tanggal 9 hingga 11

---

<sup>2</sup> Yoseph Tugio Taher, "Fakta Sejarah PRRI", diakses dari <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pid=20&dn=20071202041451>

Desember 1957. Sebagai lanjutan musyawarah tersebut, bulan Desember 1957 di Jakarta diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan. Musyawarah-musyawarah ini tidak berhasil mendapatkan cara penyelesaian masalah daerah-daerah yang membangkang terhadap pemerintah Pusat. Kegagalan ini antara lain disebabkan tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono, tidak diikutsertakan dalam pimpinan pemerintahan. Selain itu daerah-daerah yang bergolak melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa politik pemerintah Pusat mengarah kepada komunisme.<sup>3</sup>

Para tokoh dan pentolan PRRI maupun PERMESTA mendapat bantuan dan sokongan kuat dari Imperialis Amerika Serikat yang memang tidak suka atas kepemimpinan Bung Karno. AS memberi support dan bantuan apa saja untuk PRRI/PERMESTA. Persenjataan-persenjataan modern dari Amerika, seperti LMG 12,7 MM, penangkis serangan udara, Bazooka, Granat-semi otomatis, persenjataan Infantri, dan lain-lain diturunkan dari kapal terbang pengangkut AS di hutan-hutan Sumatra untuk melengkapi persenjataan militer PRRI guna melawan Pemerintahan NKRI.

Untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta dilaksanakan operasi gabungan yang terdiri atas unsur-unsur darat, laut, udara, dan kepolisian. Serangkaian operasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Operasi Tegas dengan sasaran Riau dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. Tujuan mengamankan instansi dan berhasil menguasai kota. Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 1958.
2. Operasi 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani berhasil menguasai kota Padang pada tanggal 17 April 1958 dan menguasai Bukittinggi 21 Mei 1958.
3. Operasi Saptamarga dengan sasaran Sumatera Utara dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo.
4. Operasi Sadar dengan sasaran Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu Sutowo.

Sedangkan untuk menumpas pemberontakan Permesta dilancarkan operasi gabungan

---

<sup>3</sup> Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, *op.cit.*

dengan nama Merdeka di bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat, yang terdiri dari :

- Operasi Saptamarga I dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Tengah, dipimpin oleh Letkol Sumarsono.
- Operasi Saptamarga II dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan, dipimpin oleh Letkol Agus Prasmono.
- Operasi Saptamarga III dengan sasaran Kepulauan Sebelah Utara Manado, dipimpin oleh Letkol Magenda.
- Operasi Saptamarga IV dengan sasaran Sulawesi Utara, dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat

Pemberontakan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Ahmad Husein akhirnya dapat dipatahkan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia yang melakukan “Operasi 17 Agustus” di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu kurang lebih satu minggu. Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat itu, dengan sendirinya menimbulkan kekacauan, baik terhadap pemerintah daerah, maupun terhadap kehidupan dalam masyarakat, setelah Ahmad Husein mengambil alih fungsi Gubernur Roeslan Muljodihardjo, yang diangkat oleh pemerintah Pusat di Jakarta. Kabinet Karya yang dipimpin Ir. Djuanda memutuskan pengiriman misi yang dinamakan “Misi Pemerintah untuk Normalisasi Pemerintah dan Masyarakat Sumatera Barat”. Misi Pemerintah yang dipimpin Wakil Perdana Menteri I Hardi, SH yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa menteri, pejabat-pejabat tinggi dari departemen-departemen dan beberapa perwira Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat, tiba di Padang, satu hari setelah operasi militer dianggap berhasil.

Berkat operasi militer yang cepat, niat luar negeri, khususnya Amerika Serikat untuk campur tangan dalam masalah dalam negeri Indonesia secara terbuka, dapat dihindari. Dalam iklim Perang Dingin yang sedang melanda dunia masa itu, Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan negara Blok Komunis lainnya akan beraksi, jika Amerika Serikat bertindak terlalu jauh, dan Indonesia dapat menjadi kancah pertarungan politik dunia interansional dengan segala akibatnya bagi persatuan Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit “Kembali ke Undang Undang Dasar 1945” dan tanggal 10 Juli 1959 dibentuk Kabinet Karya I dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Perdana Menteri dengan

Ir. H. Djuanda sebagai Menteri pertama. Setelah diadakan *reshuffle* dibentuk Kabinet Karya II, tanggal 18 Februari 1960. Dr. Leimena, dan Dr. Subandrio menjadi Wakil Perdana Menteri. Pada tanggal 17 Agustus 1961, untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, dan dengan pertimbangan prikemusiaan pemerintah menempuh kebijaksanaan member pengampunan berupa amnesti dan abolisi kepada para pemberontak yang menyerah di daerah-daerah dalam abtas waktu yang ditentukan. Pemberontakan-pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi dianggap berakhir.

## **Pendorong Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI/PERMESTA : Kepentingan Amerika Serikat dan Kondisi Domestik Indonesia**

Motif dasar keterlibatan AS dalam membantu pemberontakan PRRI/PERMESTA sebenarnya dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah penyebaran paham dan pengaruh komunisme hingga menjangkau kawasan Asia, khususnya Indonesia. Untuk memahami permasalahan ini secara komprehensif, maka penelusuran historis dalam mengkaji bagaimana tujuan AS yang awalnya hanya ingin menumpas komunisme ini berubah menjadi keterlibatan lebih lanjut dalam pemberontakan PRRI/PERMESTA kemudian menjadi sangat penting. Tulisan ini akan menjelaskan secara sistemik bagaimana keterlibatan AS dalam PRRI/PERMESTA muncul baik dari perspektif kepentingan AS maupun dari konteks domestik Indonesia ketika terjadinya PRRI/PERMESTA.

Melalui penelusuran historis, maka dapat diketahui bahwa keinginan AS untuk mengakhiri komunisme sebenarnya telah lama muncul sejak tahun 1917 pada masa pemerintahan Presiden Woodrow Wilson. Namun rencana Wilson ini tidak berjalan dengan efektif dikarenakan fokus kerja intelijen yang kurang, depresi besar 1930, serta Perang Dunia I dan II yang menghabiskan banyak biaya. Barulah pada masa pemerintahan Presiden Truman, AS kemudian mengeluarkan *Truman Doctrine* dan *Marshall Plan* guna membendung penyebaran komunisme di Eropa dan Asia. Dari sinilah, keterlibatan AS hingga nantinya berujung pada bantuan terhadap pemberontakan PRRI/PERMESTA dapat pertama kali dilihat. Lebih spesifiknya, Indonesia (istilah dulu “Hindia Belanda”) merupakan satu-satunya

wilayah koloni Eropa yang dicakup dalam rencana dasar Marshall Plan.<sup>4</sup>

Pertanyaan yang penting untuk dianalisis di sini adalah, kenapa Indonesia menjadi fokus dominan dari *Marshall Plan* atau proyek AS yang lain dalam menumpas komunisme. Jawaban terhadap pertanyaan ini ternyata terkait secara langsung dengan kepentingan nasional AS dan kondisi perpolitikan di Indonesia.

Dari segi kepentingan nasional, perhatian AS terhadap Indonesia sangat besar bahkan sebelum Perang Dunia II, disebabkan letaknya yang sangat strategis dan kandungan kekayaan alam yang luar biasa. Ketertarikan AS terhadap kekayaan alam Indonesia ini dapat dilihat dari instruksi Menteri Luar Negeri AS, John Fuster Dulles, kepada Duta Besar Amerika untuk Jakarta, John M. Allison, pada awal tahun 1957 yang bunyinya, “Jangan biarkan Soekarno sampai terikat kepada kaum komunis. Jangan biarkan dia menggunakan kekerasan melawan Belanda. Jangan dorong ekstremisme-nya.... Di atas segala-galanya, lakukan apa saja yang dapat Anda lakukan agar Sumatera (pulau penghasil minyak) tidak sampai jatuh ke tangan komunis.”<sup>5</sup> Dengan kata lain, menjadikan Indonesia sebagai “wilayah yang bersahabat” dinilai sangat penting bagi AS. Hal ini seperti dikutip dari Gouda dan Zaalberg yang menjelaskan bahwa George F. Kennan, Direktur *Policy Planning Staff* (PPS) bahkan pernah berkata kepada Menteri Luar Negeri AS George C. Marshall, “Persoalan paling penting dalam pergulatan kita dengan Kremlin sekarang adalah persoalan Indonesia.”<sup>6</sup> Dari dua kutipan ini dapat disimpulkan secara jelas bahwa kepentingan AS sebenarnya tidak hanya untuk membentengi pengaruh komunisme di Indonesia, namun lebih dari itu, AS juga khawatir bahwa pengaruh komunisme yang disebarkan Soviet maupun Cina kemudian mengurangi aksesnya terhadap kekayaan alam Indonesia.

Intensi AS, dari yang semula hanya ingin mencegah penyebaran komunisme di Indonesia ini kemudian meningkat tajam hingga berujung pada keputusan untuk membantu PRRI/PERMESTA karna respon dari Soekarno dan kondisi domestik di Indonesia. Hal ini seperti dijelaskan oleh Soebadio dalam tulisannya *Hubungan Indonesia Amerika Dasawarsa*

---

<sup>4</sup> Jejak CIA di Indonesia, dikutip dari <http://www.erasuslim.com/berita/laporan-khusus/jejak-cia-di-indonesia-1.htm> pada tanggal 2 November 2009, pukul 16.43

<sup>5</sup> Barbara Sillars Harvey, *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*, (PT Pustaka Utama Grafiti, 1989) hal. 121.

<sup>6</sup> Frances Gouda dan Thijs B. Zaalberg, *Indonesia Merdeka karna Amerika?, Politik Luar Negeri AS dan Nasionalisme Indonesia 1920-1949*, (PT Serambi Ilmu Semesta, 1998) hal. 35

*ke II Tahun 1955-1965*. Dalam tulisan ini, Soebadio secara lugas menyebutkan bahwa dalam pandangan Soekarno, Soviet lebih bisa dipercaya ketimbang AS karena Soviet belum pernah menjadi negara kolonial di luar negeri, sebaliknya Inggris dan Perancis adalah bekas negara-negara kolonial yang bersekutu dengan AS.<sup>7</sup> Di samping kutipan dari Soebadio, Soekarno pernah menyatakan kepada Dulles bahwa Indonesia tidak mau mengikuti dengan membabi buta jalan yang direntangkan oleh Amerika dan tidak akan menjadi satelit dari blok AS.<sup>8</sup> Penolakan Soekarno untuk menjadi bagian dari blok AS kemudian diartikan oleh AS sebagai kecenderungan Indonesia untuk lebih memilih bergabung dengan komunisme.

Selain sikap Soekarno yang diartikan AS memihak komunisme Soviet, kondisi domestik di Indonesia pada periode 1950-an juga semakin meyakinkan AS bahwa komunisme telah menjadi ancaman yang serius dan bahwa sikap tidak kooperatif Soekarno harus ditindaklanjuti. Kondisi domestik yang dimaksudkan AS di sini adalah semakin berkembangnya kekuatan dan dukungan terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua partai ini dipandang AS merupakan partai-partai berhaluan kiri yang menyuarakan suara-suara komunisme di Indonesia. Kekhawatiran AS terkait penyebaran komunisme di Indonesia kian meningkat ketika PNI dan PKI kemudian menjadi dua partai pemenang dalam Pemilihan Umum 1955 mengalahkan partai Masyumi yang didukung oleh AS. Sampai pada titik ini, AS melihat bahwa tidak ada jalan lain bagi Amerika untuk menundukkan Soekarno kecuali menyingkirkannya.

Analisis mengenai intensi AS untuk menumpas komunisme di Indonesia dan mengakhiri kepemimpinan Soekarno hingga berujung pada keterlibatan dalam pemberontakan PRRI/PERMESTA, sebenarnya tidak lengkap tanpa menyinggung sola friksi politik dalam pemerintahan Soekarno. Selain menteri-menteri dan pejabat politik yang setia mendukung kebijakan Soekarno, ada juga elit-elit politik seperti Soemitro Djojohadikusumo dan Soedjatmoko, Menteri Perdagangan dan Industri, yang memang menilai bahwa kebijakan Soekarno cenderung berbau komunisme dan harus dihentikan. Kedua elit politik inilah yang

---

<sup>7</sup> Hadi Soebadio, *Hubungan Indonesia-Amerika : dasawarsa II tahun 1955-1965*, (Tangerang, Banten : Pramita Press, 2005), hal. 42

<sup>8</sup>Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Media Pressindo, 2007), hal. 409-410



pada akhirnya berhasil direkrut oleh AS dan mengobarkan semangat pemberontakan PRRI/PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi.<sup>9</sup> Kepentingan AS akan kekayaan alam di Indonesia, kekhawatiran akan penyebaran komunisme, dan respon Presiden Soekarno serta kondisi-kondisi domestik inilah yang akhirnya memicu pemberontakan PRRI/PERMESTA yang akan dijelaskan kemudian.

### **Keterlibatan AS dalam PRRI/Permesta**

Dalam Pemberontakan PRRI dan Permesta, Amerika Serikat (AS) ikut terlibat di dalamnya. Keterlibatan AS dalam permasalahan politik Indonesia, yaitu pada Pemberontakan PRRI dan Permesta ditandai melalui campur tangan *Central Intelligence Agency* (CIA) milik Pemerintah Amerika Serikat yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Salah satu bentuk dari keterlibatan AS, khususnya CIA di dalam Pemberontakan PRRI dan Permesta adalah infiltrasi senjata-senjata dan personil. Peter Dale Scott mengatakan bahwa di tahun 1957-1958, CIA telah menginfiltasikan senjata-senjata dan personil untuk mendukung pemberontakan regional PRRI/PERMESTA yang ditujukan untuk melawan Sukarno.<sup>10</sup> Pada bulan Januari 1958, merupakan hal yang sangat jelas bahwa Amerika Serikat akan melakukan segala upaya dalam rangka memperkuat gerakan anti-komunis di Indonesia. Operasi ini berada di bawah kepemimpinan Eisenhower sebagai Presiden Amerika Serikat, dan Allen Dulles, Director of Central Intelligence (DCI), di mana operasi ini kemudian disebut dengan istilah Operasi HAIK. Operasi HAIK ini sering kali disebut sebagai salah satu kesalahan terbesar CIA, dikarenakan propaganda yang dilakukan serta dukungan terhadap pembangkang Presiden Soekarno. Amerika Serikat dalam operasi ini telah menyisihkan dana sebesar US\$ 7 juta.

Bukti fisik adanya bantuan berupa peralatan militer dan personilnya adalah sebuah pesawat terbang militer AS yang ditembak jatuh di Ambon pada tanggal 18 Mei 1958 oleh Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dengan menggunakan meriam. Pilot yang

---

<sup>9</sup> Suar Suroso, "*Bung Karno*", *Korban Perang Dingin*; (Jakarta: Hasta Mitra, 2008) hal.301.

<sup>10</sup> Manai Sophiaan, "Campur Tangan CIA dan KGB", diakses dari [http://www.freelists.org/post/nasional\\_list/ppiindia-Dokumen-Tercecer-GESTOK-1965-CAMPUR-TANGA-N-CIA-DAN-KGB-MANAI-SOPHIAAN](http://www.freelists.org/post/nasional_list/ppiindia-Dokumen-Tercecer-GESTOK-1965-CAMPUR-TANGA-N-CIA-DAN-KGB-MANAI-SOPHIAAN), pada tanggal 1 November 2009, pukul 13.22 WIB.

mengemudikan pesawat terbang militer tersebut adalah seorang penerbang berkebangsaan Amerika, yaitu Allan Lawrence Pope yang kemudian ditangkap dan diadili. Allan Pope merupakan penerbang Amerika yang disewa oleh kaum pemberontak Permesta yang secara legal diberi izin oleh pemerintah AS untuk menerbangkan angkutan udara sipil. Pope berhak untuk menggunakan lapangan terbang di pangkalan militer AS di dekat Manila, Filipina.

Pope memiliki kemampuan untuk melakukan serangan yang mampu membunuh 700 rakyat tak berdosa di Ambon dalam satu kali serangan.<sup>11</sup> Serangan itu ditujukan ke sebuah Gereja sampai hancur dan seluruh umat di dalam kebaktian itu terbunuh. Selain itu, Pope juga berhasil menenggelamkan sebuah kapal milik Indonesia dan semua awak kapal ini mengalami nasib yang malang. Kesalahan dan segala akibat yang telah diperbuat oleh Pope ini kemudian diampuni oleh Presiden Soekarno dengan menggunakan hak prerogatifnya sebagai seorang presiden. Padahal Soekarno yakin Pope merupakan salah satu agen CIA. Dan memang Pope merupakan salah satu agen CIA yang disewa oleh kaum pemberontak Permesta.<sup>12</sup> Kemurahan hati dari Soekarno ini sama sekali tidak merubah kebijakan AS terhadap Indonesia.

Tidak hanya dukungan di angkatan udara, usaha-usaha CIA juga didukung oleh sebuah tugas kekuatan angkatan laut AS di lepas pantai, yaitu Armada ke-7 milik Pemerintah AS. Angkatan darat juga ikut diperbantukan dari CIA. Berdasarkan tulisan H. W. Brands dikatakan bahwa dalam pemberontakan PRRI, CIA membantu sekitar 300 serdadu yang terdiri dari orang Amerika, Filipina, dan Taiwan dan juga beberapa pesawat terbang.<sup>13</sup> Segala bantuan ini dijalankan oleh CIA ini didasarkan pada kebijakan luar negeri AS yang dilakukan terhadap Indonesia. Kementerian Luar Negeri AS di pertengahan April 1958 memutuskan untuk menjaga komitmennya melalui bantuan pesawat-pesawat dan personil angkatan udara ke Sulawesi.<sup>14</sup> Keputusan untuk mengirim Pesawat Tempur Mustang dan pesawat pembom

---

<sup>11</sup> Manai Sophiaan, *loc.cit.*

<sup>12</sup> John Prados, *Lost Crusader: The Secret Wars of CIA Director William Colby*, (Oxford: Oxford University Press, 2003), hal. 147.

<sup>13</sup> H. W. Brands, "The Limits of Manipulation: How the United States Didn't Topple Sukarno", dalam *The Journal of American History*, Vol. 76, No. 3, (The Organisation of Historians, Desember 1989), hal. 790.

<sup>14</sup> Andrew Roadnight, *United States Policy towards Indonesia in the Truman and Eisenhower Years*, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2002), hal. 159.

jenis B-26 dilakukan oleh Menteri Luar Negeri John Foster Dulles sebagai pembuat kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Eisenhower. Bantuan militer dari AS ini dijadikan jalan untuk meningkatkan dan membenatu pemberontakan PRRI dan Permesta.

Berdasarkan keputusan Eisenhower, Presiden AS pada masa itu, langkah yang diambil oleh AS adalah menggerakkan unit-unit angkatan laut dan melepaskan *the Third Marine Division* milik AS dari Filipina memasuki area Indonesia.<sup>15</sup> Atas bantuan kekuatan udara dan kekuatan laut baru yang dimiliki oleh Permesta, Permesta mampu untuk melakukan tindakan ofensif yang membuat adanya keuntungan di teritorialnya dalam penyerangan terhadap Indonesia. Tindakan pemberontakan ini terus terjadi sampai pertengahan Mei 1958 di waktu Pemerintah Indonesia berhasil menumpas semua pemberontakan PRRI dan Permesta di pulau Sumatera dan Indonesia bagian timur dengan cara menghancurkan beberapa pesawat dan mengambil alih kontrol di daerah teritorial tersebut.<sup>16</sup>

Semua persenjataan serta alat komunikasi modern ini disalurkan kepada gerombolan pemberontak melalui Singapura, yang dikendalikan dan diorganisir oleh seorang tokoh politik dan ekonomi yang terkenal Professor Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Bahkan di Pekanbaru, rakyat sering mendapati dan melihat masuknya senjata-senjata gelap dari kapal-kapal yang datang dari Singapura. Namun demikian pihak PRRI dalam hal ini tidak pernah mau mengakui bahwa mereka sebenarnya menerima dan mengikuti arahan Imperialis AS, dan menyatakan bahwa isu yang sebenarnya terjadi adalah dugaan bahwa PRRI/PERMESTA memberontak sebagai wujud protes terhadap Presiden Sukarno yang terlalu memanjakan PKI sehingga banyak kebijakan Pemerintah yang berbau ideologi PKI.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa PRRI/Permesta tidak hanya dalam dukungan terhadap persenjataan selama pemberontakan berlangsung, namun juga melalui propaganda-propaganda yang dilakukannya. CIA kemudian berencana membuat sebuah film documenter berjudul *Happy Days* yang menceritakan mengenai *affair* yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan seorang wanita Rusia, yang menandakan bagaimana Soekarno telah jatuh ke tangan Uni Soviet dikarenakan sifat suka perempuannya tersebut. Namun yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 152.

<sup>16</sup> Trygvie Lie, *In the Cause of Peace*, (New York, 1954), hal. 3.

kemudian menjadi masalah adalah bagaimana CIA tidak berhasil mendapatkan pemeran yang dapat menirukan Soekarno, sehingga kemudian pemeran Soekarno harus menggunakan topeng Soekarno itu sendiri. Peluncuran film ini namun tidak mendapatkan perhatian seperti yang diharapkan oleh CIA, *image* Soekarno juga tidak terdiskreditkan dikarenakan hal ini.<sup>17</sup>

Keterlibatan CIA dalam peristiwa PRRI/Permesta pada dasarnya dilakukan secara tersembunyi di mana secara formal di depan media, pemerintahan Amerika Serikat berusaha menampilkan posisi netral dan tidak adanya intensi untuk melakukan segala bentuk intervensi terhadap masalah yang terjadi di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Eisenhower dalam wawancaranya dengan NBC pada bulan April 1958. Rumor keterlibatan warga Amerika Serikat dalam pemberontakan ini juga disangkal oleh Dulles yang menyatakan keraguannya akan hal tersebut. Ia juga menyatakan bagaimana pada dasarnya Amerika Serikat juga tidak memiliki kekuatan untuk mengatur setiap tindakan warga negara Amerika Serikat, khususnya di Indonesia pada zaman itu.<sup>18</sup>

## **Dampak Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI/Permesta di Indonesia**

### *Meningkatnya Kebencian Presiden Soekarno pada Amerika Serikat*

Keterlibatan AS dalam PRRI/Permesta jelas memberikan dampak bagi hubungan AS-Indonesia kala itu. Dampak pertama keterlibatan AS dalam kasus PRRI/Permesta adalah semakin memburuknya hubungan AS-Indonesia, yang ditandai dengan semakin meningkatnya kebencian Presiden Soekarno pada AS. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang wajar, mengingat Presiden AS kala itu juga terang-terangan menunjukkan sikap tidak menghargai Presiden Soekarno, seperti yang ditunjukkan pada kunjungan Presiden Soekarno ke Washington pada tahun 1960. Ketika Bung Karno mendarat di lapangan terbang Washington, Presiden Eisenhower tidak datang menyambutnya seperti yang menjadi kelaziman protocol kenegaraan yang berlaku waktu itu.<sup>19</sup> Menanggapi perlakuan tidak sopan

---

<sup>17</sup> M. Larry Portis, "The United States and Indonesia between 1945 and 1965: A Case Study of US Antagonism Toward Neutralism, diakses dari <http://davidmontero.net/maitrisefiles/thesis2004.pdf>.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Manai Sophiaan, *Campur Tangan CIA dan KGB*, [http://www.freelists.org/post/nasional\\_list/ppiindia-](http://www.freelists.org/post/nasional_list/ppiindia-)

dari Eisenhower ini, Bung Karno pun memilih bersabar dan menunggu kedatangan Eisenhower, karena Bung Karno masih berpikir mungkin Eisenhower sedang sibuk sehingga tidak bisa menjemputnya. Akan tetapi setelah Bung Karno lama menunggu, Eisenhower tetap tidak keluar dan membiarkan Bung Karno menunggu di ruang tunggu selama hampir satu jam. Bung Karno pun merasa hal ini sudah keterlaluhan, sehingga dengan tajam ia pun menyampaikan pada protokol, "Apakah saya harus menunggu lebih lama lagi? Kalau harus begitu, saya akan berangkat sekarang juga".<sup>20</sup> Protokol itupun dengan gugup segera berlari ke dalam untuk memanggil Presiden Eisenhower. Barulah kemudian Eisenhower keluar, dengan tanpa mengucapkan permohonan maaf sepele kata pun.

Tindakan Eisenhower yang tidak menyambut kedatangan Presiden Soekarno dan malah membiarkannya menunggu di ruang tunggu merupakan bukti dari sikap tidak bersahabat AS pada Indonesia. Dengan tidak menyambut kedatangan seorang utusan negara dengan sopan dan pantas, negara penerima seperti tidak mengharapkan kedatangan utusan negara tamu—dalam hal ini, AS seperti tidak mengharapkan kedatangan Indonesia, yang jelas-jelas diundangnya sendiri. Sikap tidak bersahabat itu juga menunjukkan arogansi AS yang cenderung merendahkan Indonesia yang pada saat itu memang masih berstatus negara baru. Tindakan Eisenhower tersebut tentu membuat Presiden Soekarno kecewa, ketidaksukaannya pada praktik-praktik imperialisme yang dipopulerkan AS pun semakin bertambah, kebencian Presiden Soekarno pada AS juga semakin meningkat seiring dengan peningkatan ketidaksukaan Presiden Eisenhower pada Bung Karno yang dianggap semakin condong ke kiri.

Menurut buku "Indonesia Crisis and Transformation 1965- 1968" yang ditulis oleh Marshall Green sesudah ia bertugas sebagai Duta Besar AS di Jakarta,<sup>21</sup> Rasa anti Amerika yang dikobarkan oleh Sukarno mencapai puncaknya pada tahun 1965 ketika RI menyatakan keluar dari keanggotaan PBB. Keputusan ini menjadikan Indonesia semakin dekat dengan

---

Dokumen-Tercecer-GESTOK-1965-CAMPUR-TANGAN-CIA-DAN-KGB-MANAI-SOPHIAAN, diakses pada 1 November 2009, pukul 13.22.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ringkasan dan resensi buku ini dimuat dalam harian *Suara Pembaruan*, Jakarta berturut-turut tanggal 15, 16, 17 dan 18 Juni 1991, ditulis oleh wartawan Amerika bernama Albert Kuhon. Buku ini juga diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Grafiti, Jakarta, 1992.

RRT, Korea Utara dan Vietnam Utara—yang kesemuanya beraliran komunis. Di luar negeri Sukarno juga sedang hebat-hebatnya menggalang persatuan Negara-negara berkembang Asia dan Afrika guna menentang kaum imperialis. Di dalam negeri, Sukarno menolak bantuan Amerika yang disalurkan lewat program USAID (United State Aid), serta mengisyaratkan kemungkinan pengambilalihan perusahaan Amerika Serikat seperti Calltex, Stanvac, Good Year dan Union Carbide.<sup>22</sup>

Menanggapi ketidaksukaannya pada AS, Bung Karno sering mendapat pertanyaan, apakah sikapnya anti Amerika? Bung Karno pun lantas menjawab: "Bertahun-tahun lamanya aku sangat ingin menjadi sahabat Amerika, akan tetapi sia-sia".<sup>23</sup> Pernyataan Bung Karno tersebut menyiratkan bahwa sebenarnya ia tidak membenci Amerika, akan tetapi berbagai perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya dari AS—mulai dari keterlibatan AS pada PRRI/Permesta yang menunjukkan betapa AS tidak menghormati dan berusaha mengaduk-aduk kedaulatan Indonesia, sampai pada sikap tidak bersahabat Presiden Eisenhower pada Bung Karno ketika Bung Karno mengunjungi Washington pada tahun 1960—membuat Bung Karno tidak bisa tidak membenci AS.

#### *Memburuknya Hubungan Diplomatik antara Indonesia-Amerika Serikat, dan Berubahnya Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia menjadi Condong ke Arah Komunis*

Keterlibatan AS dalam PRRI/Permesta telah membuat Indonesia berang. Indonesia pun memutuskan untuk membeberkan keterlibatan AS ini dalam forum internasional. Konferensi Asia-Afrika II dianggap merupakan momen yang tepat untuk membeberkan keterlibatan ini. Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Subandrio pun menyiapkan pengumuman yang rencananya akan disampaikan dalam konferensi itu, bahwa Indonesia mempunyai bukti adanya satu plot Amerika-Inggris akan mengadakan serangan militer terhadap Indonesia. Sayangnya, konferensi itu batal dilaksanakan. Namun pembatalan konferensi tidak lantas membatalkan niat Indonesia untuk membeberkan kesalahan AS ini. Dr. Subandrio pun kemudian memberikan interview kepada wartawan harian terbesar di Kairo,

---

<sup>22</sup> Manai Sophiaan, *op.cit.*

<sup>23</sup> Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Media Pressindo, 2007), hal. 430.

Al-Ahram, mengenai rencana Amerika-Inggris tersebut.<sup>24</sup> Semenjak itu, ketegangan pada hubungan AS-Indonesia makin terasa mencekam.

Memburuknya hubungan diplomatik AS-Indonesia kemudian melahirkan perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia, yang tadinya cukup dekat dengan negara Barat menjadi semakin ke arah kiri. Jakarta tampak lebih akrab dengan Moskow, Beijing maupun Hanoi, dan tampak garang terhadap AS dan sekutu Baratnya.<sup>25</sup> Memang tidak dapat dipungkiri, antara dekade 50-an hingga pertengahan 60-an, Bung Karno merupakan sosok yang penuh dengan kontroversi, hal ini dikarenakan karena visi politik luar negerinya yang kelewat agresif. Keagresifan Bung Karno antara lain ditandai dengan pembentukan NEFOS (*New Emerging Forces*) yang beranggotakan negara-negara Dunia Ketiga, serta gagasan pembentukan “Poros Jakarta-Beijing-Pyongyang” yang kesemuanya semakin menunjukkan kedekatan Indonesia dengan komunis.<sup>26</sup>

Ironisnya, keterlibatan AS dalam PRRI/Permesta yang sebenarnya bertujuan untuk menggulingkan Soekarno yang ketika itu dinilai mulai menunjukkan orientasi politik kiri, justru membuat Presiden Soekarno semakin anti pada AS dan semakin dekat dengan negara-negara komunis. Penulis menilai, keterlibatan AS dalam PRRI/Permesta terbukti malah “mendorong” Indonesia ke tangan komunis, bukan menyelamatkannya.

#### *Munculnya dukungan dari Amerika Serikat pada TNI dan Meningkatnya Konflik Dalam Negeri akibat Dukungan tersebut*

Kegagalan PRRI/Permesta dalam menggulingkan Soekarno tidak lantas membuat AS—dalam hal ini, CIA—putus asa dan menghentikan usahanya untuk membasmi komunis di Indonesia. Pada 1 Agustus 1958, AS mulai memberikan bantuan militer senilai dua puluh juta dollar per tahun<sup>27</sup> pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebuah memo

---

<sup>24</sup> Manai Sophiaan, *loc.cit.*

<sup>25</sup> Riza Sihbudi. *Politik Luar Negeri RI Mau Ke Mana?*. <http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-October/000341.html>, diakses pada 18 Febuari 2008, pukul 15.42.

<sup>26</sup> Sinar Harapan. *Melihat Arah Politik Luar Negeri Indonesia, Dari Bung Karno yang Vokal ke Mbak Mega yang Bungkam*. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0107/27/luu02.html>, diakses pada 3 Mei 2008, pukul 12.09.

<sup>27</sup> *Declassified Documents Quarterly Catalogue*, 1982, 002386; 1981, 367A

dari *US Joint Chiefs of Staff* yang dikeluarkan pada 1958 menyatakan bahwa bantuan ini diberikan pada ABRI yang dianggap merupakan “*the only non-Communist force ... with the capability of obstructing the ... PKI*”—satu-satunya kekuatan non-komunis, yang memiliki kapabilitas untuk menghancurkan PKI. Bantuan ini juga menunjukkan dukungan AS pada Nasution untuk menjalankan ‘rencananya’ mengontrol komunisme di Indonesia.<sup>28</sup> AS menilai Nasution memiliki visi yang sama dengannya: membasmi komunis di Indonesia—yang dibuktikan dengan peran besar Nasution dalam menghancurkan PKI pada Pemberontakan Madiun tahun 1948.<sup>29</sup>

Dukungan yang diberikan AS pada ABRI—khususnya pada Nasution—ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada eskalasi konflik dalam negeri, terutama yang berhubungan dengan berbagai usaha penumpasan PKI dan antek-anteknya. Soekarno yang pada saat itu semakin menunjukkan orientasi politik ke kiri juga merupakan tujuan dari berbagai upaya penumpasan PKI ini. Peristiwa Gestapu/G-30S-PKI kemudian membuktikan betapa sebuah dukungan dari AS pada Nasution dkk. kemudian sangat berpengaruh dalam upaya penggulingan Soekarno tersebut.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 1982, 002386 (JCS Memo for SecDef, 22 September 1958).

<sup>29</sup> Peter Dale Scott, “The United States and the Overthrown of Soekarno, 1965-1967”, dalam *Pacific Affairs*, 58, Summer 1985, hal. 239-264. Dapat pula diakses melalui internet pada <http://www.namebase.org/scott.html>.